



## Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Penataan Lingkungan (Studi Tentang Pemasangan Ipal di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang)

Irwansyah Irwansyah<sup>1\*</sup>, Mega Nugraha<sup>2</sup>, Alamsyah Alamsyah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Tamansiswa (UNITAS) Palembang, Indonesia

Email: [irwansyah@gmail.com](mailto:irwansyah@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [geganugraha@gmail.com](mailto:geganugraha@gmail.com)<sup>2</sup>, [alamsyah@unitaspalembang.ac.id](mailto:alamsyah@unitaspalembang.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *Irwansyah.* The city of Palembang is one of the cities in Indonesia that has environmental problems, namely the existence of densely populated settlements in riverbank areas. With these conditions, the Palembang City Government has made efforts to prevent river water pollution as a form of Healthy City development. This is realized by the construction of a Wastewater Treatment Plant in Karya Jaya Village, Kertapati District, Palembang City, part of which is located right on the riverside. The main concern in this study is the role of the Government of Karya Jaya Village, Kertapati District, Palembang City in empowering the community to utilize communal WWTP which includes human empowerment, business empowerment, environmental empowerment, institutional empowerment, obstacles and efforts made to overcome them. The results of the study show that the role of the Karya Jaya Village Government, Kertapati District, Palembang City in environmental management consisting of human empowerment, business empowerment, environmental empowerment and institutional empowerment has not been carried out optimally. This is because the empowerment effort is a cross-sectoral effort. The obstacles that arise in the implementation of the role of the Karya Jaya Village Government, Kertapati District, Palembang City in environmental planning consist of budget limitations, community mindset and binding rules, which have not been overcome by the efforts that have been made, namely maximizing community participation and awareness. Therefore, the Government of Karya Jaya Village, Kertapati District, Palembang City should take coordination steps with related parties to maximize its role in environmental planning in the area. Thus, the environmental arrangement efforts carried out become more optimal and comprehensive. The Karya Jaya Village Government, Kertapati District, Palembang City should take intensive coordination steps with LPMK, RW, RT administrators, religious leaders and local community leaders to overcome various obstacles that arise in environmental planning in this region.

**Keywords:** *Environmental Planning, Role, Palembang City*

**Abstrak.** *Irwansyah.* Kota Palembang adalah salah satu kota di Indonesia yang mempunyai permasalahan lingkungan hidup yaitu keberadaan permukiman padat penduduk berada di daerah bantaran sungai. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Palembang membuat upaya pencegahan pencemaran air sungai yang dilakukan sebagai bentuk pengembangan Kota Sehat. Hal ini diwujudkan dengan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang sebagian lokasinya berada tepat di pinggir Sungai. Perhatian utama dalam penelitian ini adalah peranan Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan IPAL komunal yang meliputi pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan kelembagaan, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam penataan lingkungan yang terdiri dari pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan kelembagaan belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini karena upaya pemberdayaan tersebut merupakan suatu upaya yang lintas sektoral. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan peranan Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam penataan lingkungan terdiri dari faktor keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat, belum dapat diatasi dengan upaya yang telah dilakukan yaitu memaksimalkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang sebaiknya melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan peranannya dalam penataan lingkungan di wilayah tersebut. Dengan demikian, maka upaya penataan lingkungan yang dilakukan menjadi lebih maksimal dan menyeluruh. Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang sebaiknya melakukan langkah-langkah koordinasi yang intensif dengan pengurus LPMK, RW, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam penataan lingkungan di wilayah ini.

**Kata Kunci:** Penataan Lingkungan, Peranan, kota Palembang

## **1. PENDAHULUAN**

Salah satu peran penting pemerintah kelurahan adalah menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penataan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat, proyek-proyek seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dapat lebih efektif dan bermanfaat. Namun, dalam konteks Kelurahan Karya Jaya, masalah yang muncul adalah minimnya keterlibatan kedua pihak dalam proses perencanaan IPAL Komunal. Pemerintah kelurahan dan masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat, tanpa dilibatkan secara penuh dalam tahapan perencanaan. Kondisi ini menunjukkan kurang optimalnya peran pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam proyek infrastruktur lingkungan.

Ketidakmaksimalan pelibatan masyarakat dalam perencanaan IPAL Komunal berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut. Partisipasi masyarakat yang sangat minim dalam pelaksanaan pembangunan menjadi indikasi bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya IPAL Komunal belum optimal. Hanya beberapa orang dari masyarakat yang terlibat sebagai tenaga buruh bangunan, sementara mayoritas warga kurang diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam aspek lain seperti pengawasan, pengambilan keputusan, maupun pengelolaan fasilitas setelah proyek selesai. Hal ini mengakibatkan rendahnya keterlibatan masyarakat secara substansial dalam menjaga dan merawat fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama.

Untuk meningkatkan keberhasilan program IPAL Komunal, penting bagi pemerintah kelurahan untuk lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pelibatan dalam pengelolaan fasilitas adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan proyek tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan kebersihan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan warga, tetapi juga menjamin bahwa IPAL Komunal dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Kelurahan Karya Jaya.

Menambah wawasan mengenai studi pengelolaan air limbah sebagai bentuk pengembangan Kota Sehat yang didasarkan pada fokus permasalahan air dimana hal ini merupakan potensi bagi Kota Palembang. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan kesadaran warga tentang manfaat IPAL Komunal dengan

meningkatkan upaya-upaya penyuluhan di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Memberikan informasi mengenai pengelolaan air limbah dengan sistem IPAL Komunal khususnya di wilayah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, sehingga masyarakat setempat dapat ikut memberikan pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap sarana ini. Diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program IPAL Komunal dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Konsep Pemerintahan**

Pemerintah berasal dari kata "perintah" yang secara umum berarti menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Istilah pemerintahan dapat dipahami sebagai perbuatan atau tindakan yang melibatkan cara-cara, urusan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses memerintah. Menurut Sri Soemantri (2006: 17), pemerintahan melibatkan serangkaian tindakan yang terus-menerus dilakukan secara berkelanjutan (kontinu). Sementara Utrecht (2006: 28) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah kebijaksanaan yang dilakukan dengan rencana, rasio, dan metode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintahan melibatkan aspek-aspek rasionalitas dan perencanaan yang teratur untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Definisi lain dari pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin (2002: 112), menyebutkan bahwa pemerintah merupakan jawatan atau aparatur dalam susunan politik suatu negara. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan bukan hanya tindakan memerintah, tetapi juga melibatkan struktur formal yang bertanggung jawab dalam menjalankan administrasi politik. Pemerintah sebagai institusi politik memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola urusan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui aparatur yang ada.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintahan mencakup semua kegiatan badan-badan publik, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan negara. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, pemerintahan hanya merujuk pada kegiatan badan eksekutif yang bertanggung jawab menjalankan kekuasaan administratif dalam penyelenggaraan negara (C.F. Strong, 2004: 16). Dengan demikian, peran eksekutif dalam pemerintahan sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan dan administrasi sehari-hari.

## **b. Konsep Pemerintahan Kelurahan**

Pemerintah Kelurahan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, berfungsi sebagai pembagian wilayah administratif. Dalam sistem otonomi daerah, kelurahan menjadi wilayah kerja seorang lurah yang bertindak sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Lurah, yang menjabat sebagai pimpinan kelurahan, memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelurahan berfungsi sebagai unit pemerintahan terkecil, setara dengan desa, meskipun kelurahan memiliki cakupan hak dan wewenang yang lebih terbatas dibandingkan desa dalam mengatur wilayahnya. Salah satu perbedaan penting adalah bahwa desa memiliki otonomi lebih besar dibanding kelurahan dalam hal pengelolaan wilayah dan urusan pemerintahan lokal.

Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan melalui proses administratif. Perubahan ini biasanya terjadi sebagai bagian dari kebijakan pengembangan wilayah yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Desa yang berubah status menjadi kelurahan cenderung mengalami peralihan dalam sistem pemerintahan, di mana hak otonomi yang dimiliki desa akan berkurang, dan pengelolaan wilayahnya lebih banyak diatur oleh perangkat daerah kabupaten/kota. Sebagai konsekuensinya, peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah mungkin menjadi lebih terbatas dibandingkan ketika desa masih memiliki status otonom.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 229, kelurahan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Pembentukan kelurahan ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola wilayah administrasi tertentu dengan sistem yang lebih terstruktur dan diatur oleh pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur kelurahan dan menentukan pembagian wewenang serta tanggung jawab lurah sebagai pimpinan di wilayah tersebut.

## **c. Konsep Peranan**

Menurut Poerwodarminta (2005: 571), peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tertentu. Pendapat ini menjelaskan bahwa peran mencakup perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam masyarakat sesuai dengan status atau kedudukan yang mereka miliki. Dengan kata lain, peran bukan hanya tentang apa yang seseorang lakukan, tetapi juga tentang bagaimana tindakan tersebut sesuai dengan ekspektasi sosial berdasarkan kedudukan individu dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009: 212) menambahkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Maksudnya, kedudukan seseorang dalam masyarakat bersifat statis, sedangkan peran adalah implementasi dari kedudukan tersebut yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kedudukan seseorang memberikan kerangka atau batasan bagi perilaku yang diharapkan, sementara peran adalah cara individu menjalankan tanggung jawab, hak, dan fungsi yang melekat pada kedudukan itu. Dengan demikian, peran bersifat fleksibel dan dinamis, bergantung pada situasi dan interaksi sosial yang terjadi.

Kedua pendapat tersebut menegaskan bahwa peran merupakan bagian penting dari struktur sosial, di mana individu bertindak sesuai dengan norma dan harapan yang melekat pada kedudukan mereka. Peran juga mencerminkan bagaimana seseorang mengekspresikan dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok.

Menurut Soerjono Soekanto (2009: 212), peran dan kedudukan memiliki hubungan erat di mana seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, sedang menjalankan perannya. Perbedaan antara kedudukan dan peran memang diperlukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung. Kedudukan seseorang memberikan kerangka tindakan, sementara peran adalah bagaimana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya tersebut. Dalam konteks ini, peran mencerminkan dinamika dalam menjalankan tugas berdasarkan kedudukan yang dimiliki.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terkait pekerjaannya yang sesuai dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, maka ia sedang memainkan peran sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Peran bukan hanya sesuatu yang statis, tetapi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang berdasarkan status atau kedudukannya.

Jika dihubungkan dengan tindakan pemerintah, peran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kedudukannya sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan perannya dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti penyusunan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang semuanya sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya dalam sistem pemerintahan.

#### **d. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41). Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Masyarakat, menurut Suriadi (2005: 41), adalah sekelompok individu yang merasa memiliki keterikatan satu sama lain karena berbagi identitas, kepentingan, serta perasaan kepemilikan yang sama, sering kali juga berbagi tempat tinggal atau wilayah yang sama. Masyarakat tidak hanya sekadar kumpulan orang, melainkan mereka yang saling terhubung melalui perasaan kebersamaan dan kesadaran kolektif. Keterikatan ini menciptakan solidaritas dan rasa persatuan yang penting dalam menjalankan kehidupan sosial.

Pemberdayaan, menurut definisi bahasa, adalah proses untuk membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi mampu atau berdaya dalam bertindak. Depdiknas (2003) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kemampuan atau meningkatkan ikhtiar seseorang sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kemampuan rasional atau upaya tertentu. Pemberdayaan di sini tidak hanya berarti memberikan sumber daya, tetapi juga memberikan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara mandiri.

Dalam definisi yang diungkapkan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, istilah "empower" memiliki dua makna utama. Pertama, "to give power of authority," yang berarti memberi kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Kedua, "to give ability to or enable," yang berarti memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian kekuasaan, tetapi juga pengembangan kapasitas seseorang atau kelompok agar mereka mampu bertindak secara efektif dalam berbagai situasi.

### **e. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2012: 113-117), yang mencakup empat elemen utama: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Pemberdayaan ini melibatkan proses partisipatif di mana masyarakat diberi kepercayaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama dalam pembangunan. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor yang aktif dalam proses pembangunan.

Elemen *bina manusia* menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, seperti peningkatan keterampilan dan pengetahuan, agar masyarakat lebih mampu berkontribusi secara efektif. *Bina usaha* bertujuan untuk memperkuat usaha-usaha lokal, memberikan peluang ekonomi yang lebih baik, serta mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara itu, *bina lingkungan* berkaitan dengan perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Terakhir, *bina kelembagaan* fokus pada penguatan organisasi dan sistem kelembagaan yang dapat mendukung partisipasi masyarakat secara lebih terorganisir.

Dengan memberikan peran aktif kepada masyarakat dalam proses pembangunan, kerangka ini diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian program-program pembangunan dengan kondisi nyata di lapangan. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan, sehingga berpotensi meningkatkan keberlanjutan program jangka panjang.

### **3. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami peran pemerintah kelurahan penataan lingkungan dan dalam pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

Operasional variabel penelitian ini yaitu peranan Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan IPAL Komunal, terdiri dari pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan kelembagaan, hambatan yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Lurah Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, Sekretaris Kelurahan Karya Jaya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karya Jaya, Ketua RW/RT di lokasi pemasangan IPAL Komunal, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karya Jaya, Pengurus LPMK Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif analisis. Penelitian secara deskriptif analisis di sini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis.

#### **4. HASIL PENELITIAN**

### **Peranan Pemerintah Kelurahan Karya Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Memanfaatkan IPAL Komunal**

#### **1. Pemberdayaan Manusia**

Proses pemberdayaan masyarakat bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati. Tujuan utama pemberdayaan



masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang telah melakukan proses pemberdayaan manusia pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan IPAL yang telah dibangun di wilayah tersebut.

Proses ini dimulai melalui sosialisasi perencanaan kegiatan pembangunan IPAL, pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan warga dan mendorong warga untuk memanfaatkan instalasi IPAL yang ada di wilayah tersebut. Pemanfaatan instalasi IPAL dalam hal ini dilakukan oleh warga dengan cara mengalirkan limbah dari masing-masing rumah warga ke instalasi IPAL. Selanjutnya, limbah tersebut diolah lebih lanjut sehingga tidak menjadi limbah yang berbahaya bagi lingkungan perumahan dan permukiman warga. Hasil pengolahan sebagian dijadikan sebagai pupuk dan diberikan kepada warga yang ada di wilayah tersebut untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Peran pemerintah kelurahan dalam hal pemberdayaan manusia adalah menciptakan ruang untuk masyarakat berkembang semisal menghadirkan penyuluh, membantu mengkoordinasikan kegiatan tersebut melalui aparat kelurahan tingkat bawah, serta turut serta dalam setiap pertemuan pertemuan, dan penyuluhan yang dilakukan. Dengan demikian, maka proses pemberdayaan manusia dalam pemanfaatan IPAL Komunal di wilayah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan IPAL komunal tersebut.

## **2. Pemberdayaan Usaha**

Di Kelurahan Karya Jaya pemberdayaan usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok kecil dan pemberdayaan usaha, dibidang usaha mikro diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bahan baku dan pelatihan, serta adanya pula asuransi yang tersedia seperti bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang tentunya dapat membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka punya daya untuk berkembang.

Selain itu juga pemberdayaan usaha dalam hal ini juga dilakukan dengan memberikan pinjaman modal yang bersifat bergulir kepada pengusaha warung dan penjual makanan kecil lainnya. Dengan adanya pemberdayaan usaha ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar IPAL, sehingga masyarakat dapat merasakan

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaan instalasi pengolah air limbah yang ada di tempat tinggal mereka.

### **3. Pemberdayaan Lingkungan**

Pemberdayaan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk sejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembinaan lingkungan sosial melalui pembinaan keagamaan yang dilakukan selain bermanfaat dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan ajaran agama juga terdapat nilai-nilai ekonomi didalamnya sehingga agama dan ekonomi berjalan seiring memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai pemberdayaan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan lingkungan ini bukan saja menyangkut pemanfaatan IPAL Komunal yang ada di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang, tetapi juga menyangkut lingkungan sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut. Pemberdayaan lingkungan dalam hal ini meliputi dua aspek yaitu lingkungan fisik seperti masalah kebersihan, persampahan, limbah dan pemanfaatan lahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Aspek lainnya yaitu lingkungan sosial seperti peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Hal ini merupakan dampak positif dari adanya pembangunan IPAL di wilayah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

### **4. Pemberdayaan Kelembagaan**

Pemberdayaan terhadap lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat. Di kelurahan Karya Jaya pembinaan terhadap lembaga masyarakat dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut. Pemberdayaan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Karya Jaya terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut, selain berkaitan dengan pemanfaatan IPAL yang ada di wilayah tersebut, merupakan aktivitas yang telah dilakukan secara berkesinambungan. Aktivitas ini terlaksana karena adanya kerjasama yang baik dari unsur masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemerintah setempat.

## **Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasinya**

### **1. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. Anggaran merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi dalam memberdayakan masyarakat hal yang paling utama adalah anggaran. Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana. Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan di Kelurahan Karya Jaya. Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat. Seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan kondisi kelurahan yang ingin mensejahterakan masyarakat tapi terkendala masalah anggaran.

### **2. Pola Pikir Masyarakat**

Pola pikir itu adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir yang disebut *mindset* yang merupakan kepercayaan (*belief*) atau sekumpulan kepercayaan (*set of beliefs*) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku (*behavior*) dan sikap (*attitude*) seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan nasib hidupnya. Setiap orang atau manusia secara individu pada dasarnya memiliki ide, pendapat, rencana, cita-cita. Unsur-unsur tersebut diolah oleh akal dan pikiran yang selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh attitude atau sikap perilakunya. Jadi pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (*attitude*). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya. Selain pola pikir masyarakat yang susah menerima hal-hal baru dikarenakan tidak ada percontohan yang diberikan terdapat pula pola pikir masyarakat yang statis dan acuh terhadap pembangunan yang dilakukan. Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap sebuah program serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kendala terhadap keberhasilan

tujuan pemberdayaan masyarakat, begitupula dengan pola pikir yang lambat menerima hal-hal baru meskipun hal baru tersebut dapat meningkatkan harkat martabat mereka.

### **3. Aturan Yang Mengikat**

Peraturan merupakan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur. Aturan diciptakan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam suatu wilayah. Setiap daerah punya peraturan yang mengikat untuk tercapainya tujuan dan setiap aturan harus ditaati dan disepakati bersama. Akan tetapi beberapa peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Terkadang aturan dari pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi kewilayahan disuatu daerah dan ini dirasakan dimana perangkat kelurahan semisal pengangkatan Ketua RW/RT yang harus memenuhi persyaratan administrasi sehingga terkadang tokoh kharismatik yang dimiliki dan mampu di dengar oleh masyarakat tidak memenuhi persyaratan administrasi didalam pengangkatan menjadi ketua RW/RT sehingga yang terjadi program pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat dan kurangnya partisipasi masyarakat didalamnya.

Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah Kelurahan Karya Jaya berupaya memaksimalkan potensi yang ada pada masyarakat di wilayah ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Secara umum partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat seharusnya dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangun dengan partisipasi masyarakat punya andil dalam proses pemberdayaan didaerahnya. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat perlu diwujudkan untuk menanamkan nilai kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri melainkan juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan

diperbaiki mutu hidupnya. Partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam jejaring komunitas. Partisipasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti keikutsertaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kelurahan, memberi ide atau gagasan melalui forum ataupun secara langsung ke aparat, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing masyarakat yang bersangkutan, begitupun dengan partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan sehingga muncul umpan balik tentang masalah maupun kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang sering kali tidak mendapatkan perhatian sehingga terkadang masyarakat tidak paham apa manfaat dari program yang dilakukan. Di kelurahan Karya Jaya, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari partisipasi ide/pikiran melalui forum musrenbang, dan didominasi oleh partisipasi tenaga dikarenakan dominasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan swadaya seperti pengerjaan saluran limbah dan pembuatan jalan baru, masyarakat sangat antusias dalam pengerjaannya disebabkan masyarakat memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka. Sebagai aparat pemerintah kelurahan harus berusaha membuat masyarakat berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Partisipasi merupakan tantangan besar akan tetapi dengan semangat lokal yang masih terjaga masyarakat dengan mudah digerakkan. Selama penulis melakukan penelitian ditemukan bahwa hubungan keakraban dan kepedulian diantara masyarakat masih sangat kental, saling membantu satu sama lainnya yang diarahkan oleh aparat pemerintah setempat.

## **2. Kesadaran Masyarakat**

Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kesadaran masyarakat lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari program pemberdayaan masyarakat dapat

terwujud. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi seharusnya dijadikan penopang dari jalannya program pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi harus dibarengi dengan kesadaran yang lebih dari pemerintah itu sendiri sehingga visi misi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan potensi yang ada diwilayahnya. Adanya rasa solidaritas dan sifat kekeluargaan yang masih tinggi sesama warga masyarakat dan ini digunakan untuk saling mengingatkan akan pentingnya pembangunan serta peran pemerintah dalam hal ini yaitu selaku motivator yang senantiasa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembagunan desa. Indikasi ini memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat relatif tinggi.

Faktor penghambat peranan pemerintah kelurahan dalam penetaan lingkungan di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang adalah keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat. Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah Kelurahan Karya Jaya berupaya memaksimalkan potensi yang ada pada masyarakat di wilayah ini yaitu partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari proram pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

## **5. PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam penataan lingkungan, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam penataan lingkungan yang terdiri dari pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan kelembagaan belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini karena upaya pemberdayaan tersebut merupakan suatu upaya yang lintas sektoral. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan peranan Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam penataan lingkungan terdiri dari faktor keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat, belum dapat diatasi dengan upaya yang telah dilakukan yaitu memaksimalkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, saran yang disampaikan adalah Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang sebaiknya melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak

terkait untuk memaksimalkan peranannya dalam penataan lingkungan di wilayah tersebut. Dengan demikian, maka upaya penataan lingkungan yang dilakukan menjadi lebih maksimal dan menyeluruh. Pemerintah Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang sebaiknya melakukan langkah-langkah koordinasi yang intensif dengan pengurus LPMK, RW, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam penataan lingkungan di wilayah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku:**

- Adi, 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Adimihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat, 2001. PRA (Participatory Research. Appraisal) dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Basuki, sutrisno, 2005. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Depdikbud RI, 2010. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud RI.
- Horoepoetri, Arimbi, dan Achmad Santosa, 2003. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Walhi.
- Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif. Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mardikanto, Totok, 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Leagans, P. J., 2011. Extention Education in Community Development in Kamath. M. G: Directorate of Extension. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Pambudi S, Himawan dkk., 2003. Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Yogyakarta: Lappera.
- Prijono, Onny dan Pranarka, 2006. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.
- Suharto. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana , 2004. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

### **Hasil Penelitian:**

Andi Ari Sumastono, Tesis, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan IPAL Komunal di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Ginanjar Hidayatul Ulum, Suherman dan Syafrudin, Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 13 Issue 2: 65-71 (2015). Kinerja Pengelolaan IPAL Berbasis Masyarakat Program USRI Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

Muh. Zulkarnain, Tesis, 2017. Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona.

Nilu Nur Ursyatur Aini, Tesis, 2019. Kajian Teknis dan Sosial Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Palembang.